



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

NASIONALISME DIPERTANYAKAN KEMBALI (Renungan Perjalanan Sejarah Bangsa 71 Tahun Indonesia Merdeka)

Anzar Abdullah¹, Hannati²

¹Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Pejuang RI Makassar

²Guru PKn SMP Negeri 16 Makassar

email: anzarabdullah91@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ide tentang nation adalah sebuah realitas yang dibayangkan. Demikian Benedict Anderson dalam bukunya “Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism (1983). Nasionalisme atau wacana kebangsaan, lahir bukan untuk mengusung kepentingan sebuah ras, agama atau daerah tertentu, melainkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Dengan demikian, batas-batas nominal dan cultural sebuah bangsa memang telah diciptakan, sejalan dengan cita-cita imajinasi, dan discourse yang hidup di antara para tokoh pergerakan nasional yang ikut mengusungnya. Bangsa sebagai komunitas yang “dibayangkan” karena pada prinsipnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi secara elok, meskipun mereka tidak saling jumpa secara fisik, bahkan pula tidak pernah saling mendengar tentang mereka secara seksama, namun di dalam benak masing-masing terdapat hubungan emosional sebagai comradeship, yakni semangat persaudaraan yang membentang secara horizontal. Inilah yang merupakan kepercayaan tentang nasib bersama, masa depan bersama, kesetiakawanan yang membentuk solidaritas horizontal. Factor ini pula yang memungkinkan banyak orang bersedia berkorban untuk “misi suci” demi “pembayangan” cita-cita luhur bangsa yang diyakini bersama. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang bagaimana nasionalisme itu menjadi bagian dari jati diri bangsa, sebagai perekat dalam membangun masyarakat multi etnik di Indonesia. Masihkah nilai-nilai nasionalisme itu menjadi pondasi kekuatan sebuah negara bangsa sebagaimana pada awal kelahiran Republik ini,? atukah sudah mengalami distorsi atau pengikisan dalam konteks kekinian.

Kata kunci: Nasionalisme, Perjalanan Sejarah

PENDAHULUAN

Sebuah bangsa, dan pada akhirnya Negara, sejatinya juga adalah proses menjadi. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang karena factor-faktor sejarah yang menyertainya. Demikian juga, ia menjadi Negara bangsa yang unik dan khas yang membedakan dengan neagara lain di dunia, disebabkan factor genetis dan prosesnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebuah Negara bangsa jelas memiliki dasar filosofis dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda. Negara



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kita, Indonesia adalah sebuah realitas social yang dibayangkan dan dicita-citakan. Sebagai sebuah Negara bangsa yang memiliki akar nasionalisme yang mendalam dan sejarah yang panjang, serta memperoleh kemerdekaan dengan cara terhormat dan membanggakan; sudah selayaknya bangsa Indonesia mempertahankan identitas dan jati diri sebagai modal social dalam berinteraksi, baik kompetitif maupun kolaboratif, dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Namun di balik itu, perlu kembali kita bercermin pada tesis Anderson ke hadapan “kenyataan Indonesia sebagai bangsa yang pluralistic, yang akhir-akhir ini dihantam badai krisis yang berkepanjangan, terasa semakin urgen. Apalagi kenyataannya, bangsa Indonesia tidak hentinya dirundung konflik social, disebabkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kenyataan ini justeru menjadi “mimpi buruk” bagi pembayangan yang dirumuskan seluruh warga bangsa tentang Indonesia bersatu. Sebabnya, ialah SARA berperan bagaikan minyak di atas nyala api yang membakar: alangkah panasnya nyala itu, menyiksa dan menghanguskan sekian banyak manusia di panggung sejarah. Suara pesimistis terhadap realitas ini, bahkan menyimpulkan: “sekali SARA berperan dalam konflik dan pertikaian, sulit rasanya orang keluar dari kubangan itu tanpa luka-luka social dan rohani yang mendalam.”

Bercermin dari kenyataan di atas, kesadaran akan kemajemukan, keberagaman akan menjadi nilai yang sangat penting bagi bangsa ini. Karena itu, menumbuhkan semangat pluralisme secara sejati adalah sebuah kemestian. Sebab, pluralisme, seperti digambarkan secara baik oleh Nurcholis Madjid adalah “pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

Perspektif ini penting dikemukakan, sebab dalam mengawal perjalanan bangsa ke depan, kita bangsa Indonesia kini diperhadapkan satu era baru yang disebut era millennium ketiga dari abad globalisasi. Sebuah era, dimana mobilitas dan alam pikiran manusia dari hari ke hari, kian meruag, mewaktu ke dalam system global. Globalisasi sebagai kenyataan hidup, merupakan interkoneksi yang serba melintasi dan tanpa sekat; baik dalam hubungan antar bangsa, masyarakat, komunitas, hingga persilangan kepentingan antar bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan pendidikan. Oleh karena itu, perlu sebuah terapi mental bangsa untuk mengatasi perilaku menyimpang dari warga bangsa dengan pendekatan agama, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan social.

Nasionalisme dan Etnisitas

Persoalan nasionalisme dan etnisitas di Indonesia adalah hal yang menarik untuk dibicarakan, disebabkan factor nasionalisme inilah yang menurut konsep kebangsaan menjadi perekat simpul kebangsaan. Hal ini tentu dalam konteks kekinian, muncul pertanyaan “apakah nasionalisme itu masih relevan untuk kehidupan kekinian”? Atau “apakah hubungan antara nasionalisme, agama, dan etnisitas masyarakat Indonesia masih menjadi alat perekat simpul kebangsaan”? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan kajian ilmiah sebagai refleksi atas berbagai peristiwa yang menegaskan tentang terkikisnya nilai-nilai nasionalisme itu.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Salah satu karya tulis yang menyatakan, bahwa nasionalisme itu telah mati adalah buku Daniel Bell, “*The End of Ideology*” (1960), dan karya Francis Fukuyama “*The End of History and the Last Man*” (1992).” Kesimpulan Bell yang secara eksplisit menyatakan bahwa nasionalisme sebagai ideology yang telah berakhir, adalah pernyataan yang distortif. Pendapat ini justru bertentangan dengan realitas nasionalisme, setidaknya di Negara-negara Asia Afrika paruh pertama abad ke 20. Memang ketika tesis Bell ini sedang jayanya, ideology intelektual lama abad ke 19, seperti Marxisme telah lumpuh di dalam masyarakat Barat. Sedangkan di Negara Asia Afrika justru muncul ideology baru, seperti nasionalisme, etnisitas, modernisasi, sosialisme dan demokrasi menemukan momentumnya pasca Perang Dunia II.

Karya Bell, *The End of Ideology*, mungkin sudah amat klasik, lagi pula tidak secara khusus membahas subjek nasionalisme. Namun jelas, nasionalisme tidak mati; walaupun memang tampaknya surut di Negara-negara maju. Dalam hubungan dengan ini, kita simak pendapat Hobsbawm (1990). Menurutnya, nasionalisme kini tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam perkembangan historis masyarakat dunia. Ia tidak lagi menjadi program politik global sebagaimana pernah terjadi pada abad ke XIX dan awal abad ke XX.¹ Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nasionalisme tidak lagi tampil ke permukaan dalam politik dunia. Namun ini penting diketahui, bahwa ketika Hobsbawm menulis karyanya, Uni Soviet sedang terpecah belah, karena didorong oleh akselerasi gerakan nasionalisme yang sangat kuat di seluruh wilayahnya, bahkan pengaruhnya meliputi seluruh Eropa Timur. Pada saat yang sama, Negara di Timur Tengah juga mengalami gejolak nasionalisme yang lebih hebat di bandingkan masa sebelumnya. Implikasinya ialah lahirnya sejumlah Negara baru yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk kristalisasi nasionalisme.

Semua fenomena di atas, menjelaskan bahwa nasionalisme sedang mengalami kebangkitan kembali, khususnya dikalangan masyarakat yang berada dalam transisi kearah kebudayaan industrial. Hal ini, juga merupakan argument Fukuyama dalam bukunya yang sangat terkenal, “*The End of History and The Last Man* (1992). Dengan nada yang mirip Bell dan Hobsbawm, Fukuyama menilai nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan signifikan dalam sejarah. Fukuyama melihat, semakin terkikisnya nasionalisme lama di Negara demokrasi liberal dan maju di Eropa. Kalaupun mereka masih berpegang pada nasionalisme, itu dikarenakan hanya bersifat kultural ketimbang politik, sehingga tampak lebih toleran.² Tetapi selain itu, Fukuyama juga menyatakan nasionalisme baru yang lebih politis, kini sedang bangkit, khususnya di wilayah yang baru mulai berada pada tingkat pembangunan social ekonomi yang masih rendah. Nasionalisme baru ini cenderung primitive, yakni tidak toleran, bahkan anarkis dan heroic, yang melahirkan tindakan chauvinistic, dan secara integral agresif. Hal ini dapat dilihat

¹ Lihat, E.J. Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad 21* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 193, 214.

² Francis Fukuyama, “*The End of History and The Last Man*, (New York: The Free Press, 1992), h.266-275.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

dalam sejarah. Sebagai contoh Jerman dan Italia pada masanya, dua Negara paling akhir dalam proses industrialisasi dan bersatu secara politik di Eropa merupakan tempat tumbuhnya nasionalisme radikal dalam bentuk gerakan fasisme dan ultra nasionalisme. Nasionalisme baru itu juga tumbuh paling kuat di wilayah Negara sedang berkembang, yang merupakan bekas koloni Eropa. Tidak mengherankan, kalau nasionalisme terkuat dewasa ini, juga dapat ditemukan di bekas wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur lainnya.³

Kesimpulannya, nasionalisme tetap ada di setiap bagian wilayah di dunia, bahkan diprediksi kekuatan gelombangnya hampir sama dengan kebangkitan nasionalisme pada abad ke XIX dan XX. Dan akan bertambah lebih lama dibandingkan pengalaman nasionalisme di Eropa Barat dan Amerika. Proses globalisasi yang berlangsung demikian cepat akhir-akhir ini, memang nampaknya cenderung menghilangkan batas-batas nasionalisme. Namun pada saat yang sama, ia juga mendorong peningkatan nasionalisme yang diekspresikan dalam berbagai cara dan medium.

Sekarang, bagaimana perkembangan nasionalisme kontemporer di Indonesia? Memang tidak mudah memberikan peta sebagai petunjuk yang pasti dan akurat untuk menguraikan dan menjelaskan secara runtut perkembangan nasionalisme itu. Harus diakui, terdapat semacam kelangkaan studi tentang nasionalisme di Indonesia dalam dasawarsa terakhir. Masih langkanya studi tentang tema ini, telah mengisyaratkan bahwa umumnya para ahli dan sejarawan Asia Tenggara, sepertinya menganggap nasionalisme bukan lagi isu penting bagi kawasan ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa gejolak nasionalisme yang kuat sejak abad ke XX sampai decade 1990-an, kini semakin terkikis di Asia Tenggara.

Kemudian dalam konteks kekinian, Indonesia tidak lagi mementingkan nasionalisme politik, tetapi yang sangat dibutuhkan ialah nasionalisme cultural. Karena dalam sejumlah kasus, nasionalisme cultural ini muncul berbarengan dengan meningkatnya sentiment etnisitas, bahkan sentiment keagamaan. Sebagaimana dikatakan Nodia, “nasionalisme ibarat satu koin yang memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah politik, dan sisi lainnya adalah etnik.” Hubungan kedua elemen ini, ibarat jiwa politik yang mengambil tubuhnya di dalam etnisitas.⁴ Hal ini dalam arti, bahwa nasionalisme yang muncul bisa jadi merupakan sentiment antara etnisitas dan politik yang kemudian beramal gamasi dengan semangat keagamaan. Kalau model nasionalisme seperti ini yang muncul dari dalam tubuh sebuah bangsa, maka itulah yang dinamakan *chauvinisme* dan *fasisme* yang sangat berbahaya, dapat menghancurkan sebuah bangsa, seperti yang pernah terjadi di Serbia dan Bosnia.

John Naisbitt dalam buku, *Global Paradox* (1994), secara eksplisit menyebut etnisitas chauvinistic dan radikal sebagai “*new tribalism*.” Tribalisme baru ini

³ Lihat Azyumardi Azra, *Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia: Tantangan Globalisasi*, dalam Sekretariat Negara (<http://www.setneg.go.id>), diakses 3 Januari 2013. 15.27

⁴ Gia Nodia, *Nationalism and Democracy*, dalam *Journal of Democracy*, Vol.3, No.4, 1992, h.14-15.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

secara sempurna menampakkan diri dalam berbagai tindakan kejahatan, kebrutalan, perkosaan, pembunuhan dan pembersihan etnik sebagaimana yang pernah terjadi di bekas Negara Yugoslavia (salah satu Negara pelopor berdirinya Gerakan Non Blok).

Di dalam bukunya itu, Naisbitt mengutip laporan “*The Economist*,” yang menyatakan bahwa virus tribalisme...mengandung resiko menjadi AIDS politik internasional, yang diam selama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba membara untuk menghancurkan berbagai Negara.” Naisbitt memprediksikan, pada masa depan kebanyakan konflik bersenjata akan bermotif etnik dan tribalisme, ketimbang bermotif ekonomi dan politik.⁵ Hal inilah yang harus kita hindari, karena pengalaman di Negara kita, kasus seperti ini pernah terjadi di Poso, Ambon, dan Sambas.

Teori tribalisme baru ini, pertama kali dikembangkan oleh Greeley⁶ dan Novak⁷ dengan sebutan “*a new ethnicity*.” Keduanya berargumentasi, bahwa sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi semacam kebangkitan minat dan kesadaran etnisitas, sehingga sebutan Amerika sebagai “*melting pot*” semakin kehilangan maknanya. Namun berbeda dengan tribalisme baru kontemporer yang disebut Naisbitt; Novak melihat adanya dua elemen dasar etnisitas atau tribalisme baru itu, yaitu sensitivitas terhadap pluralisme etnik yang dipadukan dengan sikap respons terhadap perbedaan cultural antara berbagai kelompok etnis, dan pengujian secara sadar terhadap warisan cultural kelompok etnis sendiri.⁸ Bagaimana relevansi teori Naisbitt, Greeley dan Novak dengan pengalaman Indonesia? Negara ini tentu saja memiliki potensi etnisitas atau tribalisme yang besar. Meskipun demikian, harus kita ingat bahwa kebangkitan tribalisme baru yang relative modern, seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, atau tribalisme primitive yang pernah melanda bekas Negara Yugoslavia, mempunyai konteks social dan historis tersendiri, yang banyak hal berbeda dengan Asia Tenggara.

Pengalaman sejarah Indonesia dengan semangat nasionalismenya, khususnya hubungan dengan factor etnisitas dan agama, sangatlah kompleks. Kompleksitas itu tidak hanya disebabkan perbedaan pengalaman sejarah dalam proses pertumbuhan nasionalisme, tetapi juga oleh reality Indonesia yang sangat pluralistik, baik secara etnis maupun agama. Peta etnografis Indonesia sangat kompleks, yang dihasilkan dari topografi kawasan ini. Indonesia dihuni oleh kelompok-kelompok etnis dalam jumlah besar, di dalamnya selain memiliki kesamaan-kesamaan fisik biologis, juga memiliki perbedaan-perbedaan bahasa dan cultural.

Namun demikian, Indonesia dalam pertumbuhan nasionalismenya, etnisitas tidak sempat mengalami kristalisasi yang menjadi dasar terbentuknya nasionalisme. Yang terpenting di antara factor tersebut adalah agama dan

⁵ John Naisbitt, *Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players* (New York: William Morrow, 1994), h. 21-25.

⁶ Andrew Greeley, *Why Cant They be Like Us?* (New York: E.P. Dutton, 1975).

⁷ Michael Novak, *The Rise of the Unmeltable Ethnics* (New York: Macmillan, 1971).

⁸ Novak, *Ibid.*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kesadaran tentang pengalaman kesejarahan yang sama. Pengalaman Indonesia, kemajemukan etnisitas beserta potensi konfliknya, dapat diredam dan dijinakkan oleh Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, yang kemudian menjadi “supra identity” yang menjadi focus kesetiaan untuk mengatasi identitas etnisitas. Kedatangan dan perkembangan Islam sebagai peradaban baru di Indonesia, tidak hanya menyatukan berbagai kelompok etnis dalam perspektif keagamaan dan dunia yang sama, tetapi juga dalam aspek penting lainnya, bahkan menjadi dasar nasionalisme. Atas jasa Islam, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, menjadi *lingua franca* berbagai kelompok etnis di Indonesia selama abad 14 sampai abad ke-17. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1928, ketika Sumpah Pemuda menyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan nasional.⁹

Kesetiaan pada Islam di Indonesia memperkuat kesadaran akan pengalaman historis yang dilalui bersama. Pengalaman kesejarahan dalam arti, bahwa penjajahan yang secara teologis menurut ajaran Islam adalah kafir. Dari sini, factor penjajahan mendorong berbagai kelompok etnis di Indonesia bersatu pada ranah teologis keagamaan. Disinilah kemudian sentiment etnisitas menjadi sesuatu yang tidak relevan. Hal ini dapat ditelusuri, misalnya pengalaman Abdul Samad al-Palimbani (1704-1789), ulama besar asal Palembang yang mengirim surat dari Mekkah kepada penguasa Jawa Mataram untuk melakukan jihad melawan Belanda.¹⁰

Dalam kasus Indonesia, nyatalah bahwa Islam menjadi unsur pendorong lahirnya nasionalisme, berbarengan dengan kemampuannya juga dalam menjinakkan sentiment etnisitas untuk menumbuhkan loyalitas kepada etnisitas yang lebih tinggi. Realiti ini dalam sejarah, nampak jelas ketika munculnya Sarekat Islam (SI) yang merefleksikan nasionalisme keislaman dan keindonesiaan; sekaligus sebagai respons terhadap kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Cina Hindia Belanda, baik Cina keturunan maupun Cina totok.¹¹ Walaupun SI pada hakikatnya merupakan respons dari berbagai aspirasi dan gagasan Ratu Adil sampai kepada upaya mengcounter dominasi orang-orang Cina. Islam melalui organisasi SI pada masanya mampu melewati batas-batas etnisitas dan wilayah.

Dengan demikian, dari pengalaman sejarah, Indonesia menunjukkan bahwa etnisitas tidak menjadi factor penghambat dalam pertumbuhan nasionalisme

⁹ Lihat, S.M.N. al-Attas, *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* (Bandung: Mizan, 1977). Untuk pengkajian secara detail tentang peranan Islam dalam pertumbuhan nasionalisme Indonesia, lihat hasil karya dari studi Fred R. von der Mehden, *Religion and Nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia, and the Phillipines* (Madison: The University of Wisconsin Press, 1963).

¹⁰ Lihat, Azyumardi Azra, *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Century*, Ph.D. dissertation, Columbia University, 1992, h.552-558.; Lihat juga, Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia, Crows Nest, Australia, Honolulu, Leiden* (Hawaii: Hawaii University Press dan KITLV Press, 2005).

¹¹ Lihat, Azyumardi Azra, *The Indies Chinese and the Sarekat Islam: An Account of the Anti-Chinese Riots in Colonial Indonesia*, dalam *Studia Islamica*, Vol. 1, No. 1, 1994.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Indonesia. Bahkan dengan etnisitas, cenderung kehilangan relevansinya sebagai sebuah tema politik. Hanya ada satu contoh yang mungkin langka, yaitu Gerakan Hasan Tiro di Aceh yang memang berusaha mengeksploitasi sentiment etnisitas Aceh *vis avis* apa yang dinamakannya sebagai “kolonialisme Jawa”. Ternyata tema etnisitas semacam ini tidak mendapatkan dukungan historis, sosiologis dan cultural dari kelompok-kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, Hasan Tiro mencoba strategi baru dengan cara mengeksploitasi sentiment lain yang mungkin lebih ampuh, yakni dengan mengusung nasionalisme Sumatera melalui apa yang disebutnya “Sumatera Merdeka”. Hal ini tentu, secara nyata sudah keluar dari konsep etnisitas dalam pengertian sesungguhnya.

Adalah sebuah ironi dan tragedy yang pahit bagi sejarah, setidaknya demikian pernyataan Himmelfarb, bahwa sekarang ini ketika nasionalisme lebih baru dan menjadi agresif dan brutal, nasionalisme lama menjadi pasif, jinak, bahkan menolak kaitannya dengan agama. Agama dipandang tidak hanya kendala, tetapi bahkan merendahkan nasionalisme itu sendiri. Dari pernyataan Fukuyama, bahkan agama dipandang sebagai penghambat nasionalisme.¹²

Pengalaman kesejarahan Indonesia yang begitu panjang tentang nasionalisme dan hubungannya dengan etnisitas dan agama, sangatlah bertentangan dengan perspektif Fukuyama. Memang Fukuyama benar, ketika menyatakan bahwa nasionalisme awal (*proto nasionalisme*) pada abad ke 16 di Eropa yang begitu kental dengan sentiment keagamaan, hanya menghasilkan fanatisme dan perang agama. Asumsi ini juga mungkin benar dalam hubungannya dengan tribalisme nasionalisme Serbia beberapa waktu yang lalu. Namun, dalam kasus Islam di Indonesia, tesis Fukuyama tidak berlaku, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan tampilan wajah yang toleran dan ramah, Islam di Indonesia justru merangsang, menumbuhkan, membangkitkan gairah dan peran dalam kelahiran dan pertumbuhan nasionalisme.

Akhirnya, perlu usaha keras merevitalisasi nasionalisme sebagai sebuah refleksi pengalaman sejarah di masa modern sekarang ini. Banyak yang menilai, baik itu semangat kebangkitan nasional maupun semangat nasionalisme tengah mengalami erosi secara signifikan. Di tengah hiruk pikuk liberalisasi politik, ekonomi dan demokrasi dalam satu dasawarsa terakhir sejak 1998, tema kebangkitan nasional yang berisi nasionalisme kebangsaan, tidak menjadi wacana publik lagi.

Sebagai akademisi, saya berpandangan bahwa nasionalisme tetap menjadi indikator jati diri sebuah bangsa. Di tengah persaingan dunia global yang kompetitif, justru nasionalisme harus direvitalisasi kembali untuk terus digelorakan oleh warga bangsa, apabila Indonesia masih mau tetap eksis di tengah pergaulan dunia internasional. Hanya dengan semangat nasionalisme, semangat keindonesiaan, kita sebagai bangsa dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

¹² Getrude Himmelfarb, *The Dark and Bloody Crossroads: Where Nationalism and Religion Meet*, *The National Interest*, (Summer), 61.Cf. ; F. Lihat juga, F. Fukuyama, *The End of History*, *The National Interest* (Summer, 1989).



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Nasionalisme Masa Lalu

Dari berbagai bacaan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep nasionalisme Indonesia bukanlah sesuatu yang baku. Ia merupakan konsep dinamis yang mengalami perubahan sebagai hasil dialektika, baik melalui perubahan social, politik, ekonomi dalam negeri maupun perubahan pada tingkat global. Dalam kerangka itu, setidaknya ada tiga tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pertama, ialah adanya pertumbuhan awal dan kristalisasi gagasan nasionalisme. Fase ini ditandai penyerapan gagasan nasionalisme, yang selanjutnya diikuti pembentukan organisasi, yang oleh Benda dan Mc Vey, serta Hobsbawm disebut sebagai “*proto nasionalisme*”.¹³ Pertumbuhan dan perkembangan proto nasionalisme dalam banyak hal, merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan cepat dan berdampak luas yang berlangsung di Indonesia dan banyak Negara lain pada decade awal abad ke XX. Dalam periode ini, pemerintah colonial Belanda melakukan kebijakan social dan ekonomi liberal. Di Indonesia, dalam bidang social, pemerintah colonial Belanda memperkenalkan politik etis yang menghasilkan golongan terpelajar bagi rakyat pribumi. Dalam bidang ekonomi, kebijakan liberal mendorong pertumbuhan sector ekonomi modern, yang berdampak luas terhadap ekonomi tradisional pribumi yang menyeretnya ke dalam system ekonomi pasar.

Semua perubahan cepat ini, menimbulkan terjadinya erupsi dalam keseimbangan tatanan masyarakat tradisional; antara lain mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kewibawaan pemimpin tradisional dan longgarnya ikatan komunal dan etnis. Namun anomaly di kalangan masyarakat tidak sepenuhnya negative. Keadaan ini justru mendorong lahirnya kesadaran baru tentang dunia yang sedang berubah, dengan tantangan baru yang memerlukan respons baru.

Liberalisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia pada masa colonial Belanda, berhasil melahirkan golongan terdidik baru dalam masyarakat, sekaligus kepeimpinan baru yang mempunyai peran dalam pertumbuhan awal proto nasionalisme. Elite baru ini sangat berperan dalam menumbuhkan kembangkan persepsi baru tentang nasionalitas berdasarkan pengalaman bersama menghadapi penjajah. Mereka menjadi perekat berbagai potensi dalam masyarakat. Mereka menjadi bagian integral nasionalisme. Mereka, kaum terpelajar mengambil inisiatif sebagai pelopor yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional; tanah air Indonesia dalam lingkup geografis kekuasaan Belanda sebagai batas-batas wilayah nasionalisme. Demikian pula berbagai suku bangsa di kepulauan nusantara terkait dengan pengalaman sejarah yang sama sebagai bangsa Indonesia.¹⁴ Inilah tahap yang paling penting dalam pembentukan Negara bangsa. Inilah tahapan

¹³ H.J. Benda dan Ruth McVey dalam *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents.* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1960). Lihat juga, E.J. Hobsbawm, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, h.57-93.

¹⁴ Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (Den Haag: Van Hoeve, 1960)



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

sejarah yang secara logis berkaitan dengan Kebangkitan Nasional 1908, yang setiap tahunnya kita peringati sebagai warga bangsa.

Tema pokok lainnya, yang dikembangkan pada fase proto nasionalisme atau nasionalisme awal ini ialah menggalang kekuatan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Represi dan koersi yang dilakukan pemerintah colonial mengakibatkan dimensi politis nasionalisme dalam fase awal ini adalah penggalangan dimensi social dan cultural. Bahkan organisasi yang muncul dan berkembang lebih bersifat cultural, social, pendidikan, dan ekonomi ketimbang bersifat politis. Hal ini dapat dijumpai pada organisasi Budi Utomo, Jong Java, Jong Islamieten Bond sampai pada Sarekat Dagang Islam. Melalui organisasi inilah komunitas politik yang dibayangkan (*an imagined political community*) mulai terbentuk dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Karena, seperti dikatakan oleh Gellner, nasionalisme sebenarnya tidak mempunyai akar begitu kuat dalam psikologis manusia. Ia harus diciptakan dan ditumbuhkan.¹⁶

Masa Pendudukan Jepang yang singkat (1942-1945) merupakan periode katalis dalam mengakselerasi pertumbuhan nasionalisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pendudukan Jepang otomatis menghambat kepentingan dan tujuan pemerintahan colonial Belanda. Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan anti Baratnya, Jepang dengan sengaja mendorong pertumbuhan nasionalisme local di Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya. Bahkan, Jepang memberikan peluang secara terbatas kepada pemimpin local untuk membicarakan masa depan wilayah mereka masing-masing.

Ketika memasuki fase kedua nasionalisme; Indonesia ketika itu, nasionalismenya sudah dapat dibaca sarat dengan muatan politis, ketimbang social dan cultural. Tema pokok nasionalisme fase kedua ini ialah “*nation and charcter building*,” yakni memupuk keutuhan dan integritas Negara dan bangsa. Pembinaan nasionalisme dalam konteks pemerintah pendudukan Jepang, bertujuan mencegah dengan cara apapun kembalinya kolonialisme dan imperialisme Eropa ke berbagai wilayah Asia.¹⁷

Pendudukan Jepang di Indonesia, menciptakan perkembangan yang sangat kompleks bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Golongan nasionalis yang memegang kendali sejak pertumbuhan awal nasionalisme, kemudian dirangkul oleh Jepang dengan cara memberikan kesempatan dan ruang gerak kepada para pemimpin agama dan ulama. Hal ini untuk memobilisasi umat Islam dari tingkat paling bawah. Kebijakan ini, kemudian menimbulkan konflik antara pemimpin nasionalis sekuler dan pemimpin yang berakar pada sentimen keagamaan.

Hanya di akhir pendudukan, Jepang kemudian beralih memusatkan perhatiannya pada pemimpin nasionalis sekuler. Dengan sengaja, kelompok ini berhasil melakukan konsolidasi untuk selanjutnya memegang kendali proses pembentukan nation state Indonesia. Golongan dari kalangan nasionalis agamis

¹⁵ B. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991), h.5-7.

¹⁶ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca: Cornell University Press, 1983), h.34.

¹⁷ Lihat Azyumardi Azra, *Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia: Tantangan Globalisasi*, dalam Sekretariat Negara (<http://www.setneg.go.id>), diakses 3 Januari 2012



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

harus melakukan kompromi untuk meratakan jalan bagi terbentuknya Negara kebangsaan Indonesia, yang hasilnya Pancasila sebagai Ideologi Negara.¹⁸

Puncak nasionalisme Indonesia dalam tinjauan Bell (1960), tercapai pada masa Soekarno. Berkat kemampuan intelektual dan retorikanya, Mending Presiden pertama RI ini, berhasil membangkitkan semangat nasionalisme, khususnya *vis a vis* kekuatan-kekuatan yang disebutnya sebagai neo kolonialisme dan imperialisme (*Nekolim*). Soekarno bukan hanya menjadi perancang nasionalisme yang cerdas, tetapi juga menjadi juru bicara (*native speaker*) nasionalisme yang artikulatif. Hal itu bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi semua Negara yang baru bebas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme.

Bagi diri Soekarno, nasionalisme merupakan konsep utama untuk membangun Indonesia yang mandiri dan terhormat di tengah pergaulan masyarakat internasional. Soekarno mengutuk eksklusivisme dan chauvinisme Eropa, yang menciptakan eksploitasi terhadap bangsa Asia-Afrika. Dalam pemikiran Soekarno, nasionalisme harus berdasarkan cinta kepada seluruh umat manusia. Meskipun di mata Soekarno, nasionalisme untuk konteks Indonesia terlalu majemuk dalam banyak hal untuk dapat diakomodasi dalam satu konsep nasionalisme kebangsaan. Namun, konsep nasionalisme itu, harus mampu memikat dan mengikat seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Soekarno, ketika mendesain nasionalisme sebagai modal dalam membangun Negara bangsa, memakai berbagai macam sumber atau racikan yang mungkin bisa bertolak belakang satu sama lain. Soekarno dapat mengambil dan menerapkan analisis Marxis tentang penindasan imperialisme. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan ideology Pan Islamisme melawan kaum kafir; begitu juga Soekarno mengambil paham sosialisme dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan melakukan berbagai racikan seperti itu, Soekarno dapat mengembangkan gagasan sentral tentang Negara bangsa sebagai sebuah entitas yang dapat mendamaikan berbagai elemen yang berseteru dalam masyarakat Indonesia, dan mensubordinasikannya kepada tujuan-tujuan jangka panjang. Dalam kerangka itulah, pada tahun 1960-an, Soekarno melontarkan konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) untuk bertindak sebagai symbol persatuan antara nasionalisme, agama dan komunis.¹⁹

Nasionalisme Soekarno, yang kental dengan sikap anti Barat (Neokolim) itu dicapai melalui penggalangan massa dari orasi dan retorikanya dengan jargon-jargon yang mempesona, membangkitkan sentiment kebangsaan anti colonial. *Nekolim* merupakan versi 1960-an dari sikap anti imperialisme pada tahun 1920-an, yang dirancangnya agar sesuai dengan situasi ketika kekuasaan colonial berlangsung.

Masih dalam konteks nasionalisme, Soekarno ketika tampil sebagai Presiden RI pertama memperkenalkan konsep dan gagasan “*To Build the World Anew*”, yakni membangun dunia baru. Untuk membangun dunia baru itu, bagi Soekarno

¹⁸ H.J.Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945* (Den Haag & Bandung: Van Hoeve, 1958). Lihat juga, Azyumardi Azra, *Japan, Indonesia, Islam and the Muslim World* (Jakarta: The Japan Foundation, 2006).

¹⁹ Lihat J.D.Legge, *Soekarno: A Political Biography* (New York: Praeger, 1972), h.31-76, 337-384.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

harus dibangun sebuah kekuatan yang dinamakannya “*New Emerging Forces*” (*Nefos*), kekuatan, kebebasan, dan keadilan; untuk melawan “*Old Established Forces*” (*Oldefos*), kekuatan lama, dan penindasan. Atas nama kepentingan bangsa, nasionalisme dan *Nefos*, Soekarno kemudian mengembalikan Irian Barat (Papua) ke pangkuan wilayah NKRI, dan melakukan kampanye ganyang Malaysia.²⁰

Berakhirnya kekuasaan Soekarno, yang disusul kegagalan kudeta berdarah PKI pada peristiwa G30S 1965, menandai berakhirnya fase kedua nasionalisme yang gegap gempita. Bangkitnya pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, dimulailah fase baru nasionalisme, yakni fase ketiga dari perkembangan sejarah bangsa; tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam konteks regional Asia Tenggara, bahkan dalam konteks hubungan internasional. Soeharto dan militer yang traumatis dengan pengalaman politik pada masa Soekarno, segera melakukan kebijakan baru dalam membangun Indonesia, dengan cara program modernisasi dan pembangunan. Nasionalisme politik yang menegangkan di masa Sekarno, berusaha diredam bahkan dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru. Konfrontasi dengan Malaysia segera diakhiri. Slogan Soekarno: *go to hell with your daid* ditutup dalam lembaran sejarah. Penekanan difokuskan pada nasionalisme ekonomi yang kadang mengharuskan Indonesia meredam nasionalisme politiknya, yang pernah bergelora di kawasan Asia Afrika, bahkan di dunia internasional.

Nasionalisme Masa Kini

Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ternyata persoalan tentang Negara bangsa belumlah tuntas. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, sewaktu Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Nasionalisme di kalangan rakyat dan pemuda waktu itu mendapat tantangan yang berat ditengah gejolak politik “*divide et impera*” Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis di berbagai wilayah. Bahkan ketika memasuki babak baru dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin di era Soekarno, persoalan nasionalisme diambil alih oleh Negara yang berujung pada lahirnya tragedy nasional G30S 1965.²¹

Pada masa Orde Baru, wacana nasionalisme pun perlahan-lahan di arahkan kepada masalah modernisasi dan industrialisasi. Maka “nasionalisme ekonomi” pun muncul ke permukaan. Sementara arus globalisasi, seakan memudahkan pula batas-batas “kebangsaan”, kecuali dalam persoalan batas wilayah dan kedaulatan Negara. Kita pun seakan menjadi warga dunia. Selain itu, Negara mengambil alih urusan nasionalisme atas nama “kepentingan nasional” dan “stabilitas nasional”. Implikasinya, ialah terjadi apa yang disebut sebagai “*greedy state*” yaitu Negara menguasai rakyat hingga memori kolektif bangsa pun dimasuki oleh Negara. Maka pada masa Orde Baru, nasionalisme yang berlaku adalah “nasionalisme Negara.”²²

²⁰ Lihat, HS Dillon dan Idham Samudra Bey, dalam Prisma, *Soekarno : Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Pajar*, Edisi Khusus Prisma, Volume 32, No.2 & no.3, 2013, h. 81.

²¹ Lihat Nina Herlina Lubis, *Potret Nasionalisme Bangsa Indonesia Masa Lalu dan Masa Kini*, dalam Sekretariat Negara (<http://www.setneg.go.id>) diakses 3 Januari 2013.

²² *Ibid.*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Tahun 1998 terjadi Reformasi yang meluluhlantakkan stabilitas semua yang dibangun Orde Baru. Peristiwa ini pun diikuti oleh masa krisis ekonomi berkepanjangan selama kurun waktu 17 tahun lamanya (1998-2015). Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin terkikis di tengah isu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin gencar menggempur Negara-negara berkembang.

Kasus Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba membangkitkan rasa nasionalisme kita, dengan menyerukan slogan “Ganyang Malaysia”. Setelah itu, muncul lagi, ketika lagu “Rasa Sayange” dan “Reog Ponorogo” diklaim sebagai budaya negeri jiran Malaysia. Semangat “nasionalisme cultural dan politik” seakan muncul dengan sendirinya. Seluruh masyarakat bersatu menghadapi ancaman dari luar. Namun anehnya, perasaan atau paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi. Dalam realitasnya kini, rasa nasionalisme cultural dan politik itu, tidak ada dalam kehidupan keseharian kita. Fenomena yang menghadang di sekitar hidup kita ialah rakyat susah mencari keadilan di negerinya sendiri. Korupsi yang meraja lela, mulai dari hulu sampai hilir, pemberantasannya tebang pilih. Begitupun pelanggaran HAM yang tidak pernah tuntas. Kemiskinan rakyat, penyalahgunaan kekuasaan tampil dalam perilaku keseharian para warga bangsa. Realitas ini, seakan menafikan cita-cita bangsa yang diperjuangkan oleh para Founding Fathers di masa lalu. Itulah potret nasionalisme bangsa kita hari ini.

Kesadaran Multi Kultural Sebagai Terapi Bangsa

Kesadaran multi cultural, muncul sejak Negara Republic Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama persatuan dan kesatuan. Paham monokulturalisme kemudian sangat dipentingkan. Akibatnya sampai sekarang, wawasan multicultural bangsa Indonesia sangat rendah. Oleh karena itu untuk membangun bangsa Indonesia ke depan, diperlukan kerja keras menerapkan asas multicultural menjadi sebuah ideology yang dapat dijadikan medium dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Melalui kerja keras bangsa Indonesia, yang tidak kalah pentingnya dalam membangun kehormatan bangsa, ialah memajukan system pendidikan nasional yang berbasis multikultur, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Ideologi atau paham multikultur juga harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk pelajaran ekstra kurikuler.

Hal lain yang juga penting dilakukan ialah menumbuhkan integrasi nasional melalui revitalisasi gagasan, musyawarah mufakat, kesetaraan, nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, keadilan dan persatuan dalam ruang lingkup pergaulan sesama anak bangsa. Memang tidak mudah bagi bangsa yang pluralistic seperti Indonesia, namun hal tersebut tetap harus dilakukan.

Selain itu, perlu ditumbuhkan rasa saling memiliki atas asset nasional sebagai warisan sejarah bangsa. Dari sini akan tumbuh rasa memiliki terhadap hasil-hasil kebudayaan nasional dan daerah, yang membuat setiap orang Indonesia dari kawasan Barat dapat menghargai, menikmati unsur-unsur kebudayaan dari



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kawasan Timur Indonesia, demikian pula sebaliknya. Mutualisme sebagai bentuk doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan perlu terus dipelihara. Strategi dan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada usaha memperkokoh persatuan Indonesia. Wallahu A’lam Bissawab.

Penutup

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas tentang multikultur dan dihubungkan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, menjadi jelas bahwa multicultural (isme) perlu terus ditumbuhkan, dengan alasan bahwa dengan kebijakan ini dapat kita maknai sebagai penerapan secara nyata prinsip “Bhinneka Tunggal Ika.” Dari sinilah kita dapat membangun masa depan bangsa Indonesia dengan semangat nasionalisme dalam konteks masyarakat multikultur.

Pada akhirnya kita harus berkeyakinan dan memutuskan sendiri, bahwa rasa kebangsaan kita harus dibangkitkan daya pecutnya. Namun bukan nasionalisme dalam bentuk yang awal. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kemelut bangsa. Harus berlaku jujur, adil, disiplin, berani tidak korupsi, bertanggung jawab menjalankan amanah rakyat bagi para pemimpin, dan toleran terhadap kemajemukan warga bangsa.

Reference

- Al-Atas, S.M.N. (1977). *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: verso.
- Azra, Azyumardi. (2013). *Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia. Tantangan Globalisasi*, dalam Sekretariat Negara (<http://www.setneg.go.id>), diakses 3 Oktober 2016.
- _____. (2006). *Japan, Indonesia, Islam and the MuslimWorld*. Jakarta: the Japan Foundation.
- _____. (2005). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia, Crowes Nest, Australia, Honolulu, Leiden*. Hawaii: Hawaii University Press dan KITLV.
- _____. (1994). The Indies, Chinese and the sarekat Islam: And Account of the anti Chinese Riots in Colonial Indonesia, dalam *Studia Islamika*, Vol. 1(1).
- Dillon, H.S. & Idham samudra Bey. (2013). *Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Gelap Putra Sang Pajar*, dalam Edisi khusus Prisma, Vol. 32, No. 2 & No. 3.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- _____. (1992). *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Century*. Columbia University Press.
- Benda, H.J. (1958). *The Cressent and the rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation in 1942-1945*. Den Haag & Bandung: Van Hoeve.
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: the Free Press.
- _____. (1989). *The End of History. The National Interest*. New York: the Free Press.
- Gellner, Ernest. (1983). *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Greeley, Andrew. (1975). *Why Cant They be Like Us?* New York; E.P. Dutton.
- Hobsbawm, E.J. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad ke-21*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Himmelfarb, Getrude. (tt). *The Dark and Bloody Crossroad: Where Nationalism and Religion Meta*. The national Interest (Summer).
- Legge, J.D. (1972). *Soekarno: A Political Biography*. New York: Praeger.
- Lubis, Herlina. (2013). Potret Nasionalisme Bangsa Indonesia Masa Lalu dan Masa kini, dalam *Sekretariat Negara* (<http://www.setneg.go.id>), diakses 3 Oktober 2016.
- Naisbit, John. (1994). *Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More Power full Its Smallest Players*. New York: William Morrow.
- Nodia, Gia.(1992). Nationalism and Democracy, dalam *Journal of Democracy*, Vol. 3 (4), h. 14-15.
- Novak, Michael. (1971). *The Rise of the Unmeltable Ethnics*. New York: McMillan.
- Von der Mehden, Fred. R. (1963). *Religion and Nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia, and the Philippine*. S.Madison: The University of Wisconsin Press.
- Van Niel, Robert. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Haag: Van Hoeve.